

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 12 No. 3 Desember 2019 Hal. 269 - 398

“LOCI IMPERIA”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Dr. Ir. Tubagus Rismunandar Ruhijat, MT., ME., MM., M.IP.
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur: 1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)
2. Drs. Hamka Kapopang (Komunikasi)

Penyunting: 1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

Mitra Bestari: 1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)
6. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)
7. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)

8. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)
9. Myrna Asnawati Safitri, S.H., M.Si., Ph.D. (Hukum Lingkungan dan Agraria)

- Sekretariat:
1. Priskilla Siregar, S.Sos.
 2. Noercholysh, S.H.
 3. Wirawan Negoro, A.Md.
 4. Didik Prayitno, A.Md.
 5. Eka Desmi Hayati, A.Md.

- Desain Grafis
dan Fotografer:
1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
 2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“LOCI IMPERIA”

Pascareformasi Indonesia di penghujung tahun sembilan puluhan, melahirkan konsep otonomi daerah. Otonomi daerah lahir dari keinginan daerah untuk tidak sepenuhnya diatur oleh pusat. Hal ini dapat dimaklumi karena setiap daerah memiliki kekhasannya sendiri, sehingga permasalahan yang dihadapi juga akan berbeda di tiap daerah. Otonomi daerah juga membuat kekuasaan pemerintah daerah menjadi lebih kuat.

Besarnya kekuasaan pemerintahan daerah menyebabkan persaingan dalam pemilihan kepala daerah menjadi sengit. Setelah terpilih pun, konflik kepentingan juga tidak dapat dihindari. Penyalahgunaan wewenang menjadi suatu yang sering ditemukan, sehingga tidak mengherankan ada banyak kepala daerah yang menjadi pesakitan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ada empat naskah dalam Jurnal Yudisial edisi Desember 2019 ini yang membahas permasalahan terkait pemerintahan daerah dan penyalahgunaan wewenang. Banyaknya tulisan mengenai tema tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan merupakan topik yang tidak habis untuk dibicarakan di bidang hukum. Tidak hanya tentang pemerintahan, dua naskah dalam jurnal edisi ini membahas tentang pidana anak. Bahkan tulisan terakhir menyoroti kasus kehamilan di masa *iddah*.

Hal ini tentu menjadi menarik, karena terkait pemidanaan anak, hukum mencari solusi yang diharapkan tidak merusak tumbuh kembang anak. Sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebab anak merupakan penerus harapan bangsa yang harus dilindungi karena rentan terhadap pengaruh lingkungannya.

Besar harapan redaksi agar tulisan dalam Jurnal Yudisial edisi kali ini dapat memberikan masukan dan khasanah keilmuan bagi perkembangan hukum di Indonesia, terkhusus terkait pemerintahan daerah dan pidana anak. Sesuai dengan tujuan jurnal ilmiah itu ada, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

CALON TUNGGAL PILKADA KURANGI KUALITAS DEMOKRASI	269 - 285
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015	
Muhammad Anwar Tanjung & Retno Saraswati	
KPU RI dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang	
EKSEKUTABILITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	287 - 303
Kajian Putusan Nomor 65P/HUM/2018	
Tahegga Primananda Alfath	
Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya	
PROBLEM KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	305 - 326
Kajian Putusan Nomor 06/G/2015/PTUN-BNA	
Sufriadi	
Departemen Hukum Acara, Fakultas Hukum	
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	
Sobirin Malian	
Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum	
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	
INTERPRETASI MODERN MAKNA MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	327 - 344
Kajian Putusan Nomor 977 K/Pid/2004	
A'an Efendi	
Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember	
<i>DISSENTING OPINION</i> DALAM MENENTUKAN BATAS UMUR ANAK	345 - 361
Kajian Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP	
Heni Susanti & Ferry Adi Fransista	
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru	

**PENGENAAN PIDANA DENDA YANG DAPAT DIKONVERSI
DENGAN PIDANA KURUNGAN PADA PELAKU ANAK 363 - 380**

Kajian Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg

Emmilia Rusdiana

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

**TEROBOSAN HUKUM HAKIM TERKAIT
PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN
DALAM MASA *IDDAH* 381 - 398**

Kajian Putusan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA.TA

Muhamad Fauzi Arifin & Lukman Santoso

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 12 No. 3 Desember 2019

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 342.512

Tanjung MA & Saraswati R (KPU RI, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang)

Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

Jurnal Yudisial 2019 12(3), 269 - 285

Secara filosofis pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk dipilih dan memilih dalam suatu proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Faktanya terjadi peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Penelitian ini membahas calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Menurut peneliti putusan Mahkamah Konstitusi perlu disikapi oleh pemangku kepentingan yang terlibat untuk tetap menjaga proses pemilihan ini berlangsung secara demokratis. Penelitian ini termasuk penelitian non-doktrinal. Fakta terkini pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal perlu dikawal sehingga pemilihan tetap berlangsung secara demokratis. Penelitian ini menyimpulkan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah memerlukan konstruksi hukum yang tepat (tidak dibiarkan terlepas) untuk menjamin demokrasi berjalan secara demokratis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Kerangka hukum harus menjamin pembatasan maksimal dukungan kursi calon kepala daerah yang diusung partai politik atau gabungan partai politik, sehingga dapat menghilangkan monopoli individu atau kelompok pemodal terhadap persyaratan dukungan calon kepala daerah.

(Muhammad Anwar Tanjung & Retno Saraswati)

Kata kunci: pemilihan kepala daerah; calon tunggal; demokrasi.

UDC 352.075.1

Alfath TP (Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya)

Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Agung Terhadap
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Kajian Putusan Nomor 35P/HUM/2018

Jurnal Yudisial 2019 12(3), 287 - 303

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang khususnya diatur dalam Pasal 60A. Akan tetapi ketentuan pada peraturan tersebut diputus telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak boleh dimaknai berlaku surut oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65P/HUM/2018. Atas adanya fakta hukum yang tidak koheren tersebut, diambil isu hukum terkait kepastian hukum dapat atau tidaknya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang juga merupakan pengurus (fungsionaris) partai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, *pertama*, terdapat kesesatan dalam penalaran hukum pada *ratio decidendi* Putusan Nomor 65P/HUM/2018. *Kedua*, putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpangi oleh KPU, karena sebagaimana dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang yang bersifat *erga omnes*.

(Tahegga Primananda Alfath)

<p>Kata kunci: <i>ratio decidendi</i>; penalaran hukum; Dewan Perwakilan Daerah.</p>	<p>(Sufriadi & Sobirin Malian)</p> <p>Kata kunci: pengelolaan perguruan tinggi; kewenangan; pemerintahan daerah.</p>
<p>UDC 353.1;378</p> <p>Sufriadi & Malian S (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia – Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta)</p> <p>Problem Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>Kajian Putusan Nomor 06/G/2015/PTUN-BNA</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(3), 305 - 326</p> <p>Melalui Putusan Nomor 06/G/2015/PTUN-BNA, majelis hakim mengakui kewenangan kepada Bupati Aceh Tenggara untuk terlibat dalam pengelolaan Universitas Gunung Leuser. Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membatasi pengelolaan perguruan tinggi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan masyarakat. Kajian ini berfokus pada dua hal: <i>pertama</i>, mengungkap konstruksi kewenangan Bupati Aceh Tenggara dalam pengelolaan Universitas Gunung Leuser berdasarkan putusan PTUN tersebut beserta masalahnya; <i>kedua</i>, menilai kesimpulan putusan tersebut mengenai kewenangan pemerintahan daerah dalam mengelola perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan adanya kekeliruan majelis hakim dalam memahami dan menerapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang dijadikan sebagai dasar konstruksi kewenangan Bupati Aceh Tenggara dalam pengelolaan Universitas Gunung Leuser. Kesimpulan majelis hakim dalam putusan tersebut yang menyatakan pemerintah daerah berwenang dalam pengelolaan perguruan tinggi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>UDC 343.352</p> <p>Efendi A (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember)</p> <p>Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Kajian Putusan Nomor 977 K/Pid/2004</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(3), 327 - 344</p> <p>Ketiadaan kejelasan makna menyalahgunakan wewenang sebagai bagian inti tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK), berimplikasi pada kewajiban bagi hakim yang menerapkan pasal tersebut terhadap kasus konkret (kasus tindak pidana korupsi), untuk melakukan interpretasi guna menemukan apa makna yang sebenarnya. Penelitian ini fokus pada masalah interpretasi modern untuk menemukan makna menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: <i>pertama</i>, menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK harus ditafsirkan dalam konteks tindak pidana dalam ruang lingkup hukum pidana bukan hukum administrasi. <i>Kedua</i>, Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/Pid/2004 yang menafsirkan makna menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK dengan mengambil alih konsep menyalahgunakan wewenang dalam hukum administrasi adalah tidak tepat. Menafsirkan menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK sama dengan menyalahgunakan wewenang dalam hukum administrasi, berimplikasi pada dualism pengaturan dan penyelesaian menyalahgunakan wewenang, dan hal ini berakibat pada tidak adanya kepastian hukum.</p>

<p style="text-align: right;">(A'an Efendi)</p> <p>Kata kunci: interpretasi modern; menyalahgunakan wewenang; korupsi.</p>	<p>UDC 343.137.5</p> <p>Rusdiana E (Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)</p>
<p>UDC 343.153</p> <p>Susanti H & Fransista FA (Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Riau)</p> <p><i>Dissenting Opinion</i> dalam Menentukan Batas Umur Anak</p> <p>Kajian Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(3), 345 - 361</p> <p>Perbedaan pendapat hakim (<i>dissenting opinion</i>) sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi independensi personal hakim ketika mengadili perkara pada sidang yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Dalam Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP telah terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim mengenai batas minimal hukuman dikarenakan terjadi perbedaan pendapat mengenai batas umur anak (terdakwa). Jenis penelitian adalah penelitian hukum <i>non-doctrinal</i>, dan sifat penelitian adalah deskriptif, dikarenakan penulis ingin menggambarkan dasar dari pertimbangan dan dampak dari adanya <i>dissenting opinion</i> yang dilakukan hakim. Pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim dengan <i>dissenting opinion</i> dapat diterima sebagai pandangan mayoritas majelis hakim. Hal ini dipengaruhi oleh faktor keadilan dan juga keputusan yang dihasilkan ketika majelis hakim memeriksa para saksi dalam perkara. Akibat hukum dari penentuan batas umur yang telah disepakati dalam Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP ini, yaitu pada saat musyawarah terjadi perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>), sehingga keputusan diambil dengan suara terbanyak yakni terdakwa dihukum di bawah batas minimal, yang seharusnya batas minimal hukuman adalah 5 (lima) tahun menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.</p>	<p>Pengenaan Pidana Denda yang Dapat Dikonversi dengan Pidana Kurungan Pada Pelaku Anak</p> <p>Kajian Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(3), 363 - 380</p> <p>Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg menjatuhkan pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti (konversi) dengan pidana kurungan dua bulan. Padahal Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan pidana denda hanya dapat digantikan dengan pelatihan kerja. Permasalahannya adalah apakah sudah sesuai penjatuhan pidana denda yang dapat dikonversi dengan pidana kurungan dikaitkan dengan asas hukum pidana, asas, dan tujuan pemidanaan anak? Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian membuktikan pengenaan sanksi pada putusan hakim tidak sesuai dengan asas hukum pidana berupa legalitas, subsidiaritas, dan kesamaan. Putusan hakim juga tidak sesuai dengan asas pemidanaan anak terutama perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, asas penghindaran pembalasan serta asas kepentingan terbaik bagi anak. Putusan ini juga menunjukkan adanya tujuan pemidanaan anak sebagai pembalasan daripada perbaikan, dan orientasi pada tujuan pemidanaan pada anak lebih dikedepankan daripada sanksi pidana itu sendiri. Jadi pelatihan kerja lebih tepat dijadikan pilihan daripada pidana kurungan.</p> <p style="text-align: right;">(Emmilia Rusdiana)</p> <p>Kata kunci: konversi pidana; asas pemidanaan anak; tujuan pemidanaan anak.</p>
<p style="text-align: right;">(Heni Susanti & Ferry Adi Fransista)</p> <p>Kata kunci: <i>dissenting opinion</i>; batas umur anak; penemuan hukum.</p>	<p>UDC 347.624</p> <p>Arifin MF & Santoso L (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo)</p>

Terobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan dalam Masa *Iddah*

Kajian Putusan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA.TA

Jurnal Yudisial 2019 12(3), 381 - 398

Perkawinan dalam masa *iddah* secara hukum tidak dapat dilaksanakan sebelum masa *iddah*-nya habis. Berbeda halnya dengan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *iddah*. Penelitian terhadap putusan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan pendekatan yuridis dan analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa, dasar hukum yang digunakan majelis hakim yaitu Pasal 153 ayat (2) Huruf b KHI, QS. At-Thalaq ayat 4, serta Pasal 53 KHI, yang diketahui dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtvinding*), di antaranya: *pertama*, metode interpretasi sistematis dan metode *istimbatih* digunakan untuk mengetahui bahwa masa *iddah* W (pemohon) bukan *iddah* hamil akan tetapi *iddah qurû'*; *kedua*, metode *a contrario* (*argumen a contrario*) terhadap Pasal 153 ayat (2) huruf c KHI, untuk mengetahui siapa pria yang menghamili W (pemohon), sekaligus sebagai dasar untuk mencabut surat penolakan perkawinan dari KUA tersebut; dan *ketiga*, silogisme terhadap Pasal 53 KHI, untuk mengetahui bahwa di antara W (pemohon) dengan S (calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

(Muhamad Fauzi Arifin & Lukman Santoso)

Kata kunci: surat penolakan perkawinan; masa *iddah*; penemuan hukum.

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC 342.512

Tanjung MA & Saraswati R (KPU RI, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang)

Single Candidacy of Local Head Elections that Harms the Quality of Democracy

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XIII/2015 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2019 12(3), 269 - 285

Philosophically, regional head elections are the implementation of people's sovereignty to be elected and vote in a democratic election process. There has been an increase in the number of regional elections with a single candidate. This research discusses the only candidate in the election of regional heads based on the Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XIII/2015. According to researchers, the decision of the constitutional court needs to be addressed by the stakeholders that involved keeping the election process going on democratically. This study is non-doctrinal research. The latest facts about the election of a regional head with a single candidate need to be guarded so that the polls will continue democratically. This research concludes that a single candidate in the local head election requires an appropriate legal construction (not left aside) to ensure democracy runs democratically after the Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XIII/2015. The legal framework must guarantee the maximum support limitation for regional head candidate seats that carried by political parties or the association to eliminate the monopoly of individuals or groups of financiers regarding the support requirements of local head candidates.

(Muhammad Anwar Tanjung & Retno Saraswati)

Keywords: regional head election; single candidate; democracy.

UDC 352.075.1

Alfath TP (Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya)

Executability of Supreme Court Decision on Election of the Regional Representative Council Members

An Analysis of Decision Number 65P/HUM/2018 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2019 12(3), 287 - 303

The General Election Commission (KPU) has enacted KPU Regulation Number 26 of 2018 concerning the Second Amendment to KPU Regulation Number 14 of 2018 over the Nomination of Individual Election of Regional Representative Council Members. The provisions of this regulation, especially Article 60A, contravene with Law Number 12 of 2011 concerning the Legislation Drafting Process. In the Decision Number 65P/HUM/2018, the Supreme Court should not retroactively interpret the KPU regulation. Due to the incoherent legal facts, legal issues raised in this article is about legal certainty whether a candidate of the Regional Representative Council (DPD) member can also become a political party official. This research uses legal research methods with normative, conceptual, and case approaches. The results of this research are as follows. The results of this research are as follows. First, there are errors in legal reasoning on the ratio decidendi of the Supreme Court Decision Number 65P/HUM/2018. Second, the Supreme Court Decision can be distorted by the KPU because the court acted like the Constitutional Court reviewing an erga omnes law.

(Tahegga Primananda Alfath)

Keywords: rasio decidendi; legal reasoning;

Regional Representative Council.	UDC 343.352
<p>UDC 353.1;378</p> <p>Sufriadi & Malian S (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia – Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta)</p> <p>Problem of Regional Government Authority in Managing Universities</p> <p>An Analysis of Decision Number 06/G/2015/PTUN-BNA (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(3), 305 - 326</p> <p>Through Decision Number 06/G/2015/PTUN-BNA, the panel of judges authorized the regent of the Southeast Aceh to be involved in the management of Gunung Leuser University although Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System says that management of universities is under the authority of central government and community. This study consist of two purposes. First, to disclose the legal construction of regent authority in managing Gunung Leuser University based on the administrative court decision and related problems. Second, to examine the conclusion of the court decision over the authority of Southeast Aceh local government in managing Gunung Leuser University based on national legislation. This study uses a normative research method, with case and legislation approach. It indicates that the panel of judges made an error in understanding and implementing Article 81 paragraph (1) of the Law on Higher Education as the legitimate basis for the authority of the regent. The conclusion indicated that the local government was authorized in managing Gunung Leuser University was also contradicted with some regulations, particularly Laws on National Education System, Higher Education, and the Local Governance.</p>	<p>Efendi A (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember)</p> <p>A Modern Interpretation Over the Abuse of Authority in Corruption</p> <p>An Analysis of Decison Number 977 K/Pid/2004 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(3), 327 - 344</p> <p>The lack of clarity on the definition of the term “abusing authority” as the core element of corruption, as stated in Article 3 of Law Number 20 of 2001 (PTPK Law), implies the obligation for judges who apply the article against concrete cases to interpret the real meaning. This research focuses on the problem of modern (contemporary) interpretation to find the purpose of abusing the authority in corruption. The type of research is doctrinal legal research with the legislation approach, conceptual approach, and case approach. This research concludes: First, abusing authority in corruption must be interpreted in the context of criminal acts within the scope of criminal law rather than administrative law. Second, the Supreme Court Decision Number 977 K/Pid/2004 that understanding the meaning of abusing authority in Article 3 of the PTPK Law by taking over the concept of abusing authority in administrative law is inappropriate. Interpreting the term “abusing authority” in Article 3 of the PTPK Law is similar to that in administrative law, can be implicated in the dualism of regulation and resolution of this problem, and this can cause the absence of legal certainty.</p> <p style="text-align: right;">(A’an Efendi)</p> <p>Keywords: modern interpretation; abuse of authority; corruption.</p>
<p style="text-align: right;">(Sufriadi & Sobirin Malian)</p> <p>Keywords: management of higher-education; authority; local governance.</p>	<p>UDC 343.153</p> <p>Susanti H & Fransista FA (Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Riau)</p> <p>Dissenting Opinion in Determining Children’s Age Limit</p>

<p>An Analysis of Decision Number 81/PID.SUS/2015/PN.PRP (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(3), 345 - 361</p> <p>The dissenting opinion is possible to occur as a consequence of independent judges when judging cases at a trial conducted by the panel of judges. In the Decision Number 81/PID.SUS/2015/PN.PRP, there has been a different opinion regarding the minimum sentence due to differences opinions over the children's age limit (the defendant). This type of research is non-doctrinal legal research, and the character of this research is descriptive because the writer wants to describe the basis of the consideration and the impact of the dissenting opinion. The legal concerns that delivered by the judge with a dissenting opinion should be accepted as the majority view of the panel of judges by considering the justice factor and examining testimonies of the witnesses. As decided in the consensus of the panel of judges, the legal consequence on the determination of the age limit is that the judges should change the penalties for the defendant, from five years becoming six months imprisonment.</p> <p style="text-align: right;">(Heni Susanti & Ferry Adi Fransista)</p> <p>Keywords: dissenting opinion; child's age limit; judicial law-making.</p>	<p>fine should be job training. The question is to determine whether the conversion of criminal fines with confinement is already in accordance with the principles of law, policies, and the purpose of criminal punishment for children. This type of research is normative juridical. The results of the study need to show that the imposition of sanctions on judges' decision is not following the principles of criminal law in the form of legality, subsidiarity, and equality. The court decision is not under the policy of child punishment, especially deprivation of liberty and conviction as a last resort, the principle of avoidance of retaliation, and the principle of the best interests of children. This decision also shows that the purpose of punishing children in revenge rather than reparation, and orientation towards the goal of criminalization of children is more prioritized than criminal sanction itself, so job training is best suited as a choice rather than confinement sanction.</p> <p style="text-align: right;">(Emmilia Rusdiana)</p> <p>Keywords: criminal conversion; principle of child criminalization; purpose of child criminalization.</p>
<p>UDC 343.137.5</p> <p>Rusdiana E (Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)</p> <p>The Conversion of Impositioning Criminal Fines to Confinement Sanction for Child/Junevile Offenders</p> <p>An Analysis of Decision Number 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(3), 363 - 380</p> <p>Decision Number 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg has impose a prison sentence and a fine, with the provisions that if it is unpaid, it will be substituted with a two-month confinement sentence. Article 71 paragraphs (3) the Criminal Justice System for Children requires that the substitution of criminal</p>	<p>UDC 347.624</p> <p>Arifin MF & Santoso L (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo)</p> <p>Judicial Breakthrough on the Revocation of Marriage Rejection Letter During the Iddah Period</p> <p>An Analysis of Decision Number 287/Pdt.P/2017/PA.TA (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(3), 381 - 398</p> <p>No marriage is allowed for a woman during the period of iddah. This guidance is different from the substance of Tulungagung Religious Court Decision Number 287/Pdt.P/2017/PA.TA that has revoked the marriage rejection letter during the iddah period. The research on this decision was carried out with a literature study with a juridical approach and qualitative analysis. The legal basis used by the panel of judges is Article 153 Paragraph 2 letter b KHI, QS. At-Thalaq verse 4 and Article</p>

53 KHI. The judges also made some judicial law-making (*rechtsvinding*) that can be inferred as follows. First, the use of a systematic interpretation method and *istimbat* method for the conclusion that the *iddah* of the applicant (W) in this case, is not *iddah* pregnant but *iddah* quru. Second, the use of the *a-contrario* argument against Article 153 Paragraph 2 letter c KHI to find out the man who has impregnated the applicant. This argument is also the logical basis for revoking the marriage rejection letter from the KUA. Third, the use of syllogism against Article 53 KHI to make sure there is no obstacle of marriage between the applicant and her prospective husband (S).

(Muhamad Fauzi Arifin & Lukman Santoso)

Keywords: marriage rejection letter; the *iddah* period; judicial law-making.